

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kota Bandung

1.1.1 Potensi Daya Tarik Wisata Kota Bandung

Berdasarkan kondisi pariwisata dan pola pengembangan perkotaannya, Kota Bandung dapat diklasifikasikan sebagai destinasi pariwisata. Potensi daya tarik wisata di Kota Bandung antara lain:

a. *Wisata Heritage*

Wisata Heritage yang terdapat di Kota Bandung didominasi oleh pengaruh peninggalan dari zaman penjajahan Belanda.

b. *Wisata Pendidikan*

Wisata pendidikan adalah daya tarik wisata museum, berbagai institusi pendidikan, pondok pesantren dan taman kota.

c. *Wisata Belanja dan Kuliner*

Kegiatan wisata belanja dan kuliner dapat dikatakan menjadi daya tarik utama bagi pengembangan kegiatan pariwisata di Kota Bandung.

d. *Rekreasi dan Hiburan*

Untuk rekreasi dan hiburan di Kota Bandung lebih banyak merupakan jenis wisata buatan. Untuk kegiatan hiburan yang berupa wisata budaya.

e. *MICE (Meeting Incentive, Convention and Exhibition)*

Tersedianya berbagai sarana prasarana pendukung seperti aksesibilitas, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana transportasi, gedung konferensi, dll.

1.1.2 Sarana Prasarana Penunjang Pariwisata Kota Bandung

Dikaitkan dengan kegiatan pariwisata yang terdapat di Kota Bandung, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di Kota Bandung antara lain:

a. Hotel

Hotel yang terdapat di Kota Bandung, terdiri dari berbagai tipe mulai dari hotel melati hingga hotel berbintang.

b. Restoran/ Rumah makan

Dengan dijulikinya Kota Bandung sebagai kota “*fashion and cuisine*”, maka kegiatan jasa yang bergerak dalam bidang kuliner sangat banyak dan beragam.

c. Pusat perbelanjaan

Salah satu bentuk sarana perbelanjaan yang menjadikan Kota Bandung sebagai daya tarik bagi wisatawan adalah keberadaan *Factory Outlet*.

d. Sistem Transportasi

Transportasi di Kota Bandung terbagi menjadi sistem transportasi jalan raya, rel, dan transportasi udara.

1.2 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Guna terdapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Perlu disusun sistem dan prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 Tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II seluruh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “*door to door*” menjadi “*self assesment*” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

1.2.1 Aktivitas Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Untuk pelaksanaan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung menerapkan program-program operasional dan dilaksanakan dalam bentuk:

1. Program penyuluhan lapangan kepada masyarakat wajib pajak;
Sebagai operasional dari program tersebut Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung melaksanakan kegiatan seperti melakukan kegiatan penyuluhan pendaftaran kepada wajib pajak. Selain itu kegiatan penyuluhan yang bersifat langsung dilakukan juga penyuluhan tidak langsung dengan melalui berbagai media, serta melayani keberatan dari wajib pajak.
2. Program menyusun dan menghitung pajak;
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung adalah melakukan perencanaan dan pembinaan teknis pemungutan, serta melakukan peningkatan dalam hal penggalian potensi pajak.
3. Program penyusunan standar pengolahan data;
Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah melakukan penyempurnaan dari mulai administrasi, klarifikasi, Perhitungan dan pengolahan data pajak.
4. Program penyusunan sistem informasi dan komunikasi;
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah penyempurnaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, penataan kearsipan data pajak, penataan ruang kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan proyek pengadaan hardware pada “payment point”
5. Program penyusunan sistem penagihan pajak;
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dispenda Kota Bandung adalah melakukan kegiatan penagihan bagi para wajib pajak yang tidak taat.

1.3 Latar Belakang Penelitian

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menetapkan UU No.32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 sebagai

pengganti UU No. 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di negara Indonesia. Setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi-potensi lain yang terdapat di daerahnya sendiri, guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur.

Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. (Mardiasmo, 2004: 8).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang “Pokok-pokok Pemerintah Daerah”. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan bagian laba BUMD dan investasi lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Komponen-komponen PAD di atas, menjadi sumber penerimaan daerah yang tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, merupakan salah satu bentuk dalam menyelenggarakan otonomi daerah, dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah dengan tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya. Berikut ini tabel persentase Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung:

Tabel 1.1
Persentase antara Target dan Realisasi Pajak Daerah di Kota Bandung
Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target	Realisasi	%
2008	207.017.095.999,25	213.459.234.013	103
2009	185.734.177.013	285.773.405.892	154
2010	291.800.000.000	302.378.839.983	104
2011	546.000.000.000	665.854.660.260	122
2012	727.000.000.000	820.484.823.396	113

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa dalam kurun waktu tahun 2010-2012 pajak daerah di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan dan realisasinya selalu melebihi target yang ditetapkan, artinya pajak daerah di Kota Bandung memiliki potensi yang baik. Selain itu, sumber mengatakan. “Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bandung 2010 kembali mengalami defisit anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. Untuk menutupi defisit anggaran tersebut, pemkot Bandung akan menggenjot pendapatan dari sektor pajak industri hotel dan restoran,” Ungkap Sekertaris Daerah Kota Bandung Edi Siswandi yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemkot Bandung. Sektor-sektor yang memungkinkan untuk digenjot, diantaranya pendapatan dari Pajak Hotel dan restoran. Menurutnya, Pemkot Bandung bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp 200 miliar dengan melakukan intensifikasi pajak Hotel dan restoran. Selain pajak hotel dan restoran, berharap pendapatan dari pajak reklame juga meningkat seiring dikeluarkannya perwal tentang reklame. Pajak dari industri pariwisata dan hotel kemungkinan besar masih tetap bakal jadi sektor yang paling besar menyumbang

pemasukan. Defisit anggaran akan mampu ditutup bila Pemkot Bandung melakukan intensifikasi PAD, khususnya dari pajak hotel dan restoran.” (ortax.org, 4 februari 2010).

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan “Sektor perhotelan dan restoran memberi kontribusi yang signifikan bagi Jabar, yakni menyumbang 22,41 persen dari PDRB Jabar, mencapai Rp770,66 triliun atas dasar harga berlaku tahun 2010, angka itu meningkat Rp80,81 triliun dari tahun sebelumnya. Sektor perhotelan dan restoran masih menjadi salah satu penggerak utama aktivitas perekonomian masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan ke depan antara lain meningkatkan promosi, diantaranya membentuk badan promosi pariwisata daerah”. (bisnis-jabar.com, 30 maret 2011).

Jenis pajak daerah yang berlaku di Kota Bandung antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
8. Pajak Air Bawah tanah.

Sesuai dengan Visi Kota Bandung, yaitu menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, Pemerintah kota Bandung berusaha menggali potensi kotanya dengan lebih baik. Banyak jasa yang ditawarkan oleh Kota Bandung, diantaranya wahana wisata keluarga (tempat rekreasi dan hiburan) wisata belanja (pusat perbelanjaan, *factory outlet*) dan wisata kuliner (restoran, *cafe*, dan rumah makan lainnya). Tentu saja jasa-jasa ini mengundang banyak wisatawan untuk datang atau berwisata di Kota Bandung.

Dari sekian banyak jasa yang ditawarkan oleh kota Bandung, penulis memfokuskan untuk meneliti objek jasa Hotel. Pajak Hotel ini dianggap potensial mengingat Kota Bandung merupakan daerah yang memiliki cukup banyak objek

wisata yang dapat mengundang minat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang dan menginap di Kota Bandung.

Tabel 1.2
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Kota Bandung
Tahun 2010-2012

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik	Jumlah
2010	180.603	3.024.666	3.205.269
2011	194.062	3.882.010	4.070.072
2012	158.848	3.354.857	3.513.705

Sumber: bandungkota.bps.go.id

Dikarenakan alasan tersebut, di daerah ini banyak pengusaha yang mendirikan hotel. Setiap balas jasa diberikan oleh konsumen kepada hotel yang ada, tentunya akan mendatangkan penghasilan juga untuk pemerintah Kota Bandung dalam bentuk Pajak Daerah. Terkait dengan hal tersebut jumlah hotel di Kota Bandung terus meningkat. Terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Jumlah Hotel di Kota Bandung
Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
2010	272	12.039
2011	301	14.088
2012	340	16.148

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Parawisata

Selain itu menurut penelitian yang dilakukan Nugraha dan Triantoro (2004). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD kota Bandung telah melebihi 50%, dimana kontribusi terbesar berasal dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR), akan tetapi persentase perolehannya masih fluktuatif. Hal ini diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Kontribusi Pajak Daerah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2010-2012

Jenis Pajak Daerah	2010		2011		2012	
	Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi
Pajak Hotel	87.611.335.427	28,97%	110.865.807.790	16,66%	141.766.250.847	17,30%
Pajak Restoran	73.573.789.261	24,33%	85.192.607.158	12,79%	98.040.550.470	11,96%
Pajak Hiburan	26.747.603.927	8,85%	31.019.515.619	4,66%	33.856.025.207	4,13%
Pajak Reklame	11.616.090.321	3,84%	15.315.316.254	2,30%	18.512.330.978	2,26%
Pajak Penerangan Jalan	96.946.622.459	32,06%	108.779.806.117	16,34%	118.649.903.427	14,48%
Pajak Parkir	5.883.398.588	1,95%	5.897.885.990	0,89%	19.797.707.448	2,42%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan			306.250.907.376	46%	385.391.791.475	47,03%
Pajak Air Bawah tanah			2.532.813.956	0,38%	3.470.263.544	0,42%
Total	302.378.839.983	100%	665.854.660.260	100%	819.484.823.396	100%

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hotel, petugas Dispenda berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya, target ini telah dibuat perbulan, dengan patokan berdasarkan pada penerimaan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berikut ini data realisasi penerimaan pajak hotel yang mengalami peningkatan yang cukup besar dari tahun 2010 hingga tahun 2012.

Tabel 1.5
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung
Tahun 2010-2012

Tahun	Target	Realisasi
2010	78.000.000.000	87.611.335.427
2011	92.000.000.000	110.865.807.790
2012	131.000.000.000	142.766.250.847

Sumber: Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dalam tabel 1.5 terlihat bahwa target yang telah dibuat selalu melebihi yang telah ditentukan. Ini berarti secara umum tingkat efektivitas pemungutannya baik, akan tetapi tingkat efektivitas ini akan kembali dipertanyakan jika pada kenyataannya realisasi penerimaan Pajak Hotel masih di bawah potensi yang sebenarnya. Dalam Penelitian Jaya dan Retnaningtyas (2013) menyatakan besar potensi pajak hotel di Surabaya tahun 2010 adalah sebesar Rp. 108.978.172.016,08 dan pada tahun 2011 sebesar Rp 120.515.770.836,339 dan realisasi penerimaan pajak hotel berbintang di surabaya belum efektif karena terdapat perbedaan yang signifikan antar potensi dengan realisasinya.

Hasil penelitian yang dilakukan Hidayat (2010) menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan dari efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran secara simultan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan secara parsial, efektivitas penerimaan pajak daerah lebih dipengaruhi oleh kontribusi dari efektivitas pemungutan pajak hotel.

Mengingat pentingnya Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung, maka penulis berpendapat untuk mengukur seberapa besar pengaruh dari kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan mengoptimalkan potensi pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah, maka penulis merasa perlu untuk meneliti mengenai Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung. Maka peneliti mengambil judul:

**“ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN DAN UPAYA
PAJAK (*TAX EFFORT*) HOTEL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun
Anggaran 2010-2012)”**

1.4 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012?
2. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012?
3. Bagaimana Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012?
4. Bagaimana Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung pada tahun 2010-2012?
5. Bagaimana pengaruh secara parsial:
 - a. Apakah terdapat pengaruh antara Potensi Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah?
 - b. Apakah terdapat pengaruh antara Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah?
 - c. Apakah terdapat pengaruh antara Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel dengan Penerimaan Pajak Daerah?
6. Apakah Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Potensi Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012.

2. Untuk mengetahui Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012.
3. Untuk mengetahui Upaya Pajak (*Tax Effort*) Hotel di Kota Bandung pada tahun 2010 sampai 2012.
4. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung pada tahun 2010-2012.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh antara Potensi Pajak Hotel dengan penerimaan Pajak Daerah.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh antara Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dengan penerimaan Pajak Daerah.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh antara Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel dengan penerimaan Pajak Daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung.

1.6 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dua aspek, yaitu aspek akademis dan praktis:

1.6.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel serta pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang kajian yang sama.

3. Instansi Terkait

Diharapkan dapat memberi masukan perbaikan, dan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait.

1.6.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna bagi Pengetahuan Potensi Pajak Hotel, Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Upaya Pajak (*tax effort*) Hotel untuk perkembangan yang lebih baik kedepannya.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Lingkup Penelitian

Bab tinjauan dan lingkup penelitian berisi rangkuman teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian, tahapan penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab hasil penelitian dan pembahasan menguraikan keadaan yang diteliti, analisis dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variable independen terhadap variabel dependen.

BAB V Kesimpulan Dan Saran

Bab kesimpulan dan saran berisi tentang penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis penelitian dan saran kongkrit yang berpengaruh dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.